

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN: FORMULASI, IMPLEMENTASI HINGGA EVALUASI

Achmad Qorni Novianto^{1*}

¹UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang

*Korespondensi: qorni21@gmail.com

ABSTRACT

Ideally, the library has a written collection development policy to avoid inconsistencies in decision making in collection development activities. The formulation of a collection development policy should consider (1) the parties related to collection development activities, and (2) the preparation of a policy text tailored to the vision, mission and needs of the library. The successful implementation of collection development policies is based on (1) accommodating policy content, and (2) library characteristics and conditions. Evaluation of collection development policies is needed to (1) map the library's performance in carrying out various collection development activities, and (2) restructure collection development policies that will be implemented in the future.

ABSTRAK

Idealnya, perpustakaan memiliki kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis untuk menghindari inkonsistensi pengambilan keputusan dalam kegiatan pengembangan koleksi. Formulasi kebijakan pengembangan koleksi, hendaknya mempertimbangkan (1) pihak-pihak yang terkait kegiatan pengembangan koleksi, dan (2) penyusunan naskah kebijakan disesuaikan dengan visi, misi dan kebutuhan perpustakaan. Keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan koleksi didasarkan pada (1) konten kebijakan yang akomodatif, dan (2) karakteristik dan kondisi perpustakaan. Evaluasi kebijakan pengembangan koleksi diperlukan untuk (1) memetakan performa perpustakaan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan koleksi, dan (2) menyusun kembali kebijakan pengembangan koleksi yang akan diimplementasikan di masa mendatang.

Keywords: Collection; Library Policy; Collection Development Policy

1. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan perannya sebagai sumber informasi, perpustakaan harus dapat menyediakan koleksi yang tepat guna bagi pemustaka. Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 12, disebutkan bahwa koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengembangan koleksi yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan perpustakaan atau lembaga induknya serta mempertimbangkan kebutuhan dari pemustaka.

Agar dapat melaksanakan kegiatan pengembangan koleksi secara terarah, perlu disusun sebuah ketentuan tertulis yang digunakan pustakawan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan koleksi di perpustakaan mulai dari seleksi hingga *stock opname* koleksi dan penyiangan koleksi. Perpustakaan perlu merumuskan kebijakan pengembangan koleksi yang

didasarkan pada visi, misi dan tujuan penyelenggaraan perpustakaan serta kebutuhan pemustaka. Qalyubi (2007:78) menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan koleksi merupakan alat/sarana untuk mengarahkan segala aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, pemilihan, dan pengadaan bahan pustaka.

Tanpa memiliki kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis, tidak ada standar baku pelaksanaan pengembangan koleksi di perpustakaan. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak jelasnya arah pengembangan koleksi karena inkonsistensi pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan studi yang dilakukan Chaputula dan Canyundo (2014:324), mereka menemukan bahwa tidak adanya kebijakan pengembangan koleksi menyebabkan kegiatan pengembangan koleksi tidak memiliki arah yang jelas mengenai bahan apa yang seharusnya dikembangkan, berapa jumlahnya, bagaimana prosedur pengadaan koleksi, peran apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing pihak, bagaimana penanganan koleksi yang sudah usang, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui (1) mekanisme penyusunan naskah kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan, (2) implementasi kebijakan pengembangan koleksi, dan (3) evaluasi kebijakan pengembangan koleksi. Dengan adanya artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pustakawan maupun pengelola perpustakaan terkait kompleksitas kebijakan pengembangan koleksi yang dimulai dari penyusunan hingga mekanisme evaluasinya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Pengembangan Koleksi

Definisi kebijakan yang diungkapkan oleh Parsons (2008:14) adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional (standar) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, menurut Hugh Heglo dalam Sugandi (2011:77) kebijakan adalah “a course of action intended to accomplish some end”, atau suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan telah diputuskan oleh seseorang atau lembaga/pemerintah berdasarkan suatu ketentuan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam Perka Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2016, pengembangan koleksi adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai kebutuhan pemustaka. Darmono (2007:57) menjelaskan bahwa pengertian pengembangan koleksi perpustakaan mencakup semua kegiatan untuk memperluas koleksi yang ada di perpustakaan, terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan dan evaluasi bahan pustaka. Novianto (2013:2) pengembangan koleksi (*collection development*) merupakan semua

kegiatan yang bertujuan untuk memperluas koleksi perpustakaan dalam rangka menyajikan bahan pustaka yang mutakhir sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Dalam rangka melaksanakan fungsi strategisnya sebagai pusat sumber informasi, perpustakaan harus melaksanakan kegiatan pengembangan koleksi secara terarah berdasarkan ketentuan tertulis yang telah disepakati dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi dan kebutuhan pemustaka. Berdasarkan Perka Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2016, kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan adalah pernyataan tertulis tentang kebijakan perpustakaan terhadap pengembangan koleksi yang digunakan pustakawan sebagai acuan dalam menyeleksi bahan perpustakaan. Chaputula dan Canyundo (2014:317) mengemukakan bahwa proses perumusan dan penggunaan kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan dilakukan untuk menguraikan keadaan koleksi saat ini dan menentukan komposisi pertumbuhan koleksi di masa depan. Kebijakan pengembangan koleksi dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan koleksi bagi pustakawan di masa depan, karena penggunaan kebijakan pengembangan koleksi dapat membantu memastikan konsistensi praktik pengembangan koleksi sehingga mewujudkan koleksi yang dinamis.

Berdasarkan berbagai sumber, dapat disimpulkan tujuan penyusunan kebijakan pengembangan koleksi adalah sebagai berikut:

1. memberikan arah dan realisasi visi dan misi perpustakaan melalui penyediaan koleksi perpustakaan;
2. membangun koleksi perpustakaan yang lengkap, relevan, mutakhir dan berorientasi pada kebutuhan pemustaka;
3. menyediakan pedoman teknis/pedoman kerja tentang penyediaan koleksi perpustakaan (meliputi kegiatan seleksi, pengadaan/akuisisi, stock opname, penyiangan hingga pelestarian bahan pustaka); dan
4. membantu menentukan skala prioritas dalam penganggaran dan pengadaan koleksi perpustakaan.

Dari sisi regulasi standar pengelolaan perpustakaan di Indonesia, ketersediaan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan juga dipandang sangat vital keberadaannya. Hal tersebut dapat dibuktikan pada program asesmen akreditasi perpustakaan, suatu perpustakaan diharuskan memiliki kebijakan pengembangan koleksi, khususnya bagi perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan provinsi. Berdasarkan Perka Perpustakaan Nasional Nomor 4, 10 dan 11 tahun 2018 yang mengatur instrumen akreditasi perpustakaan provinsi, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus, penilaian tentang ketersediaan kebijakan pengembangan koleksi masuk dalam komponen 1 (komponen koleksi) nomor 1. Berdasarkan Perka Perpustakaan Nasional Nomor 4, 10 dan 11 tahun 2018, untuk mendapatkan penilaian yang maksimal (A),

disarankan agar kebijakan pengembangan koleksi ditinjau setiap tiga tahun sekali. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bahan evaluasi terkait kebijakan pengembangan koleksi yang ada saat ini, jika memang diperlukan perubahan menyesuaikan keadaan dan kebutuhan perpustakaan.

Selanjutnya, implementasi atau pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan juga masuk dalam Perka Perpustakaan Nasional Nomor 4, 10 dan 11 tahun 2018 tentang instrumen akreditasi perpustakaan provinsi, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus. Pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi yang berkenaan dengan (1) jenis koleksi, (2) jumlah koleksi, (3) bentuk koleksi, (4) subjek koleksi, (5) kemutakhiran, (6) distribusi, (7) anggaran, dan lainnya masuk dalam asesmen akreditasi perpustakaan. Hal tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perpustakaan mengimplementasikan kebijakan pengembangan koleksi yang telah disusun serta komitmen perpustakaan dalam melaksanakan pengembangan koleksinya.

3. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pada penelitian ini, objek penelitian digali melalui beragam sumber pustaka yang berupa buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder (data yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu). Sumber data dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Analisis data menggunakan analisis konten (content analysis) dan teknik analisis deskriptif untuk menjelaskan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Kebijakan Pengembangan Koleksi

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Chaputula dan Canyundo (2014:324), tidak adanya kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis dapat menyebabkan (1) perbedaan/inkonsistensi pelaksanaan kegiatan pengembangan koleksi oleh staf perpustakaan, dan (2) tidak ada jaminan bahwa praktik pengembangan koleksi yang diterapkan saat ini dapat dilanjutkan oleh staf baru karena tidak adanya pedoman baku pelaksanaan pengembangan koleksi di suatu perpustakaan. Selanjutnya, Ernaningsih & Dewi (2016:190) menyatakan bahwa kebijakan pengembangan koleksi hendaknya tidak hanya dikomunikasikan secara lisan tetapi juga harus tertulis. Kebijakan pengembangan koleksi yang tertulis dapat meminimalisir berbagai permasalahan yang terjadi di kemudian hari yang berkaitan dengan konsistensi dan kontinuitas. Berdasarkan hal tersebut, perpustakaan perlu merumuskan kebijakan tertulis tentang berbagai jenis kegiatan pengembangan

koleksi di suatu perpustakaan untuk menghindari inkonsistensi pengambilan keputusan pengembangan koleksi.

Dengan adanya kebutuhan ataupun permasalahan yang timbul karena tidak adanya kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis, maka perpustakaan perlu menyusun formulasi kebijakan pengembangan koleksi. Formulasi dipergunakan untuk menyatukan perencanaan yang rasional dan menyeluruh dalam rangka menentukan apa yang harus dilakukan terhadap suatu permasalahan (Nawawi, 2009:107). Formulasi kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan harus disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan perpustakaan agar peran strategis perpustakaan sebagai pusat sumber informasi dapat terealisasi dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Iswanto (2017:9) yang mengemukakan bahwa kebijakan pengembangan koleksi harus disusun berdasarkan visi dan misi perpustakaan, sehingga koleksi yang dimiliki benar-benar berkualitas dan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pemustaka.

Pada proses penyusunan formulasi kebijakan pengembangan koleksi, hendaknya melibatkan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengembangan koleksi di suatu perpustakaan. Hal tersebut diperlukan untuk mewedahi berbagai usulan/aspirasi dari berbagai pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan pengembangan koleksi di perpustakaan, mengingat bahwa kebijakan yang baik menurut (Hasbullah, 2016:63) adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada serta meminimalisir adanya kerugian pihak-pihak tertentu.

Yulia (2007:2.32) merumuskan bahwa terdapat 3 unsur dalam kebijakan pengembangan koleksi sebagai berikut.

1. Pernyataan Kebijakan Umum, berisikan misi perpustakaan (yang berkaitan dengan tujuan pokok lembaga induknya), pernyataan yang jelas tentang tujuan secara institusional secara keseluruhan untuk perpustakaan, mengetahui kelompok pengguna utama beserta programnya, menetapkan prioritas umum yang berkaitan dengan seleksi, serta dapat juga berisikan hal yang berhubungan dengan kerja sama perpustakaan. Pada pernyataan kebijakan umum, terdapat kebijakan seleksi dan kebijakan pengadaan. Kebijakan seleksi berisikan prosedur pelaksanaan seleksi, alat bantu yang digunakan, serta metode yang harus diikuti didalam menentukan bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi. Kebijakan pengadaan adalah prosedur yang harus digunakan untuk memperoleh bahan pustaka, dalam hal ini cara memperoleh bahan pustaka adalah melalui pembelian, pertukaran, dan hadiah.
2. Pernyataan Tingkat Koleksi, berisikan daftar terperinci yang berkaitan dengan bidang ilmu yang dikembangkan perpustakaan sekolah dan keadaan koleksi perpustakaan sekolah, serta format yang dikoleksi. Selain itu, juga menyatakan bidang ilmu apa yang kuat dan bidang ilmu apa yang lemah koleksinya yang perlu untuk dikembangkan. Perlu juga dicantumkan

bagaimana keadaan koleksi yang diinginkan di masa mendatang. Perincian bidang-bidang ilmu dapat menggunakan bagan klasifikasi Dewey Decimal Classification atau bagan klasifikasi lainnya. Pada bagian pernyataan akan tingkat koleksi, kebijakan harus memerinci koleksi ke dalam subjek-subjek yang menjadi unsur pokok, mengidentifikasi jenis-jenis materi yang dikoleksi dan menentukan kelompok pengguna utama untuk setiap subjek.

3. Pernyataan Beragam Pokok Persoalan, berisi tentang perlakuan terhadap bahan pustaka yang diterima sebagai hadiah, penyiangan (weeding), evaluasi terhadap pengembangan koleksi, masalah protes dan keluhan, sensor, serta pengembangan koleksi bersama. Semua topik itu penting karena berkaitan dengan pengembangan koleksi.

Dalam menyusun naskah kebijakan pengembangan koleksi, hendaknya memuat hal-hal berikut.

1. Bagian pengantar/pendahuluan, yang memuat: (1) latar belakang, tujuan, dan dasar hukum penyusunan kebijakan pengembangan koleksi; (2) visi dan misi perpustakaan; dan (3) alokasi anggaran pengembangan koleksi.
2. Kebijakan umum koleksi: (1) lingkup koleksi: deskripsi masyarakat yang dilayani, bahasa koleksi, dan sensor/deskripsi bahan yang tidak dikoleksi; (2) jenis koleksi: koleksi tercetak dan elektronik; (3) proses seleksi: prioritas kegiatan seleksi, alat seleksi yang digunakan, kriteria seleksi pada bahan tercetak, elektronik dan koleksi hadiah; (4) pembinaan koleksi: evaluasi koleksi, penyiangan koleksi, perbaikan koleksi, pengecekan ketersediaan koleksi/stock opname dan jadwal pelaksanaan pembinaan koleksi.
3. Kebijakan pengembangan koleksi bahan pustaka tercetak: (1) pembelian: jenis buku yang dikoleksi (buku teks, buku referensi dan sebagainya), jumlah eksemplar yang disepakati, kriteria/kualitas buku yang dibeli (misalnya kualitas jilidan bagus dan harus buku asli, bukan fotokopi); dan (2) penanganan buku hadiah: relevansi dengan bidang ilmu yang ada di perpustakaan, kondisi fisik/kualitas bahan, dan mekanisme pengelolaan bahan pustaka yang tidak sesuai kriteria.
4. Kebijakan pengembangan koleksi bahan pustaka elektronik: (1) tipe koleksi: e-book, e-journal, dan bahan lainnya; (2) relevansi dengan bidang ilmu yang ada di perpustakaan; (3) ketentuan teknis seleksi: kemudahan akses, metode pengadaan/pembelian, evaluasi dan perpanjangan berlangganan (misalnya pada saat berlanggan e-journal); dan (4) penanganan hadiah bahan pustaka elektronik.
5. Bagian penutup: (1) masa berlaku kebijakan dan peninjauan/evaluasi naskah kebijakan secara berkala seiring dengan kebutuhan perpustakaan; dan (2) penentuan hal teknis yang belum diatur dalam kebiakan pengembangan koleksi.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam menyusun naskah kebijakan pengembangan koleksi adalah kesesuaian terhadap kebutuhan, visi dan misi penyelenggaraan suatu perpustakaan. Tentu hal ini mengakibatkan perbedaan kebijakan antara satu perpustakaan dengan perpustakaan yang lainnya. Sesuai dengan pendapat Darmono (2007:57) dimana perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebijaksanaan pemerintah, kondisi ekonomi yang berpengaruh terhadap kebijaksanaan pendanaan, suasana dan lingkungan pendidikan, keadaan penerbitan, kebiasaan pemakai, sikap masyarakat serta faktor-faktor lain yang bersifat lokal (kondisi setempat). Berdasarkan berbagai faktor tersebut, standar tertentu untuk penyusunan kebijakan pengembangan koleksi sulit ditumuskan, sehingga masing-masing perpustakaan akan mengembangkan koleksinya didasarkan pada karakteristik dan kebutuhannya masing-masing.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dari suatu siklus kebijakan. Implementasi kebijakan (Sugandi, 2011:88) mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran implementasi kebijakan (Grindle, 2017:6) adalah membentuk tautan yang memungkinkan tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah/lembaga. Dalam hal ini, pernyataan tujuan/harapan pemerintah/lembaga dalam suatu kebijakan diterjemahkan ke dalam serangkaian aksi/program untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam kebijakan. Implementasi kebijakan adalah melaksanakan pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan perundangan yang berlaku, didukung oleh personel yang profesional, serta sarana prasarana yang tersedia (Hasbullah, 2016:93). Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting atau bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya akan menjadi impian atau rencana yang bagus dan hanya tersimpan rapi dalam arsip tanpa diimplementasikan. Selain itu, tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan dapat diketahui dengan melihat bagaimanakah implementasinya.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak terlepas dari perumusan kebijakan yang kelak membuahkan isi kebijakan (content policy) yang akomodatif serta lingkungan dimana kebijakan dimaksud diimplementasikan Grindle (2017:8). Selain proses perumusan kebijakan hingga menghasilkan isi kebijakan, faktor lingkungan juga berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Hal tersebut dikarenakan adanya karakteristik yang unik pada suatu organisasi/lembaga yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan

pengembangan koleksi dapat diukur dari isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context policy*). Isi kebijakan terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan lingkungan kebijakan terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik rezim, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Kejelasan tujuan-tujuan kebijakan pengembangan koleksi yang telah dirumuskan dan komitmen aktor/pelaksana kebijakan terhadap tujuan kebijakan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan proses implementasinya (Rahardjo, 2010:8). Melalui proses formulasi kebijakan pengembangan koleksi yang melibatkan berbagai pihak yang terkait, tentu semua pihak akan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing sehingga tujuan pengembangan koleksi dapat tercapai dengan baik. Berbagai hal yang terkait dengan pengembangan koleksi yang dimulai seleksi bahan pustaka hingga stock opname dan weeding dari harus dilaksanakannya sesuai dengan naskah kebijakan pengembangan koleksi yang telah disusun. Hal tersebut adalah bentuk konkret tujuan penyusunan kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis, yaitu konsistensi dalam pengambilan keputusan pengembangan koleksi.

Pengembangan koleksi merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan penuh dengan berbagai macam permasalahan. Namun, menurut Ernarningsih & Dewi (2016:198) permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan membangun komunikasi yang efektif dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan koleksi yang telah ditetapkan. Para pustakawan harus proaktif dan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan koleksi, hal ini bertujuan agar kegiatan pengembangan koleksi dapat terwujud sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Misalnya, pada saat perpustakaan hendak melaksanakan pengadaan bahan pustaka, diperlukan masukan/kontribusi dari unit lain atau sivitas akademika sebagai pengguna utama perpustakaan mengenai bahan pustaka apa yang mereka butuhkan, sehingga koleksi yang tersedia di perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika respon dari sivitas akademika terkait pengusulan buku yang mereka butuhkan masih rendah, pustakawan harus “jemput bola” dengan menyusun daftar bahan pustaka terbaru yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku sehingga mereka hanya perlu memilihnya. Dengan melaksanakan hal tersebut, diharapkan perpustakaan dapat mendapatkan informasi mengenai judul-judul bahan pustaka yang diinginkan oleh penggunanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Rahardjo, 2010:11) yang menyatakan bahwa kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran (dalam hal ini pengguna perpustakaan) juga merupakan aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Tanpa adanya respon/tanggapan tertentu selama implementasi, tidak tersedia informasi yang memadai guna melakukan evaluasi prestasi dan keberhasilan program.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya berasal dari konten kebijakan yang akomodatif semata, lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan juga ikut berperan dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Grindle, 2017:8). Misalnya, implementasi kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan X pada tahun 2016 akan berbeda dengan perpustakaan X pada tahun 2021 karena perbedaan struktur organisasi, karakteristik pemustaka yang dilayani, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Kompleksitas suatu organisasi tentu akan berbanding lurus dengan kompleksitas implementasi kebijakan pengembangan koleksi. Namun, bagaimanapun juga ketersediaan kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis akan membantu pelaksanaan kegiatan pengembangan koleksi, karena mencakup hal apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Dalam implementasi kebijakan pengembangan koleksi, pustakawan dan berbagai pihak yang terkait harus berusaha semaksimal mungkin melaksanakan berbagai ketentuan yang ada dalam naskah kebijakan. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui aspek mana saja yang tercapai dan mana yang belum tercapai sebagai indikator keberhasilan implementasi sekaligus bahan evaluasi kebijakan pengembangan koleksi.

Evaluasi Kebijakan Pengembangan Koleksi

Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, tentu diperlukan proses evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui capaian dari kebijakan yang diterapkan. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui aspek apa saja yang harus dipertahankan, ditingkatkan dan apa yang perlu diubah sesuai dengan kebutuhan lembaga/organisasi sesuai dengan keadaan yang terkini. Evaluasi kebijakan (Nawawi, 2009:157) memberikan beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, evaluasi dapat menunjukkan capaian suatu tujuan, sasaran atau target tertentu.
2. Memberikan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target suatu kebijakan.
3. Evaluasi dapat menyumbangkan rekomendasi alternatif kebijakan (perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan) berdasarkan informasi terkait tidak memadainya suatu kebijakan.

Berdasarkan manfaat dari evaluasi kebijakan sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa kebijakan pengembangan koleksi perlu didokumentasikan secara tertulis untuk mengetahui sejauh mana tujuan pengembangan koleksi suatu perpustakaan dapat tercapai melalui dokumen tertulis yang telah disusun dan disepakati bersama. Dengan adanya dokumen yang tertulis, maka dapat diketahui apa yang perlu dilakukan penyesuaian secara jelas dan konkret. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Chaputula dan Canyundo (2014:324) yang menyatakan bahwa

penyusunan kebijakan pengembangan koleksi berfungsi untuk (1) mendokumentasikan keadaan koleksi yang ada saat ini, dan (2) mengarahkan pertumbuhan koleksi berdasarkan kebutuhan saat ini dan masa depan.

Ernaningsih & Dewi (2016:195) mengemukakan bahwa evaluasi dalam kegiatan pengembangan koleksi dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pengembangan koleksi. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun ulang kebijakan pengembangan koleksi yang disesuaikan dengan visi-misi lembaga induknya, mengetahui beragam aspek yang perlu dibenahi dan dikembangkan, serta penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi saat ini. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Rahardjo, 2010:5) yang mengemukakan bahwa kebijakan merupakan sebuah tanggapan pemerintah/lembaga terhadap masalah-masalah tertentu, kebutuhan serta aspirasi yang berkembang. Misalnya, karena rendahnya respon sivitas akademik untuk menyampaikan judul dan jenis bahan pustaka yang diinginkan melalui formulir tercetak atau google form, akhirnya perpustakaan memanfaatkan media sosial untuk menjaring kebutuhan bahan pustaka karena pada saat ini berbagai jenis media sosial sangat digemari oleh masyarakat dari beragam kalangan. Hal tersebut sesuai dengan istilah library follow user, dimana perpustakaan akan selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik penggunanya.

Evaluasi terhadap kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats) atau KKPA (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman). Sutarno (2006:119) menyatakan bahwa analisis SWOT dapat dapat dipergunakan oleh perpustakaan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat yang dilayaninya. Dalam hal ini, dengan memanfaatkan analisis SWOT, perpustakaan dapat memetakan performanya dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan koleksi. Menurut Nurkholisa dan Christiani (2018:84), terdapat pembagian faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam analisis SWOT ini yaitu kekuatan dan kelemahan berada dalam internal organisasi perpustakaan (IFAS: Internal Factors Analysis Summary), sedangkan yang dapat dilihat dari luar organisasi perpustakaan adalah kesempatan dan ancamannya (EFAS: External Factors Analysis Summary). Berikut ini adalah matriks SWOT yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan pengembangan koleksi.

Tabel 1. Matriks SWOT

<i>IFAS</i> <i>EFAS</i>	<i>STRENGTHS (S)</i> Tentukan 5-10 faktor kekuatan dari penilaian kondisi lingkungan internal	<i>WEAKNESSES (W)</i> Tentukan 5-10 faktor kelemahan dari penilaian kondisi lingkungan internal
<i>OPPORTUNITIES (O)</i> Tentukan 5-10 faktor peluang dari penilaian kondisi lingkungan eksternal	<i>STRATEGI SO</i> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<i>STRATEGI WO</i> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang
<i>THREATS (T)</i> Tentukan 5-10 faktor Ancaman dari penilaian kondisi lingkungan eksternal	<i>STRATEGI ST</i> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<i>STRATEGI WT</i> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Nurkholisha & Christiani (2018:85)

Hasil analisis SWOT terhadap kebijakan pengebangan koleksi perpustakaan, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan dan/atau pemecahan masalah yang tepat terkait kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan. Menurut Nurkholisha dan Christiani (2018:86), pendekatan analisis SWOT dapat membantu perpustakaan untuk mengkategorisasi faktor internal dan eksternal yang terkait dengan objek kebijakan pengembangan koleksi, yang selanjutnya dijadikan landasan untuk memperbaiki konten sebuah kebijakan agar dapat memenuhi kebutuhan perpustakaan seiring perkembangan zaman. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan utama pemanfaatan analisis SWOT dalam mengevaluasi kebijakan pengembangan koleksi adalah untuk menyusun kembali kebijakan pengembangan koleksi yang akan diimplementasikan di masa mendatang dengan mempertimbangkan kebutuhan pemustaka serta keselarasan dengan visi dan misi penyelenggaraan perpustakaan, sebagaimana siklus dari sebuah kebijakan yang harus melalui fase evaluasi untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

5. KESIMPULAN

Perpustakaan perlu merumuskan kebijakan tertulis tentang berbagai jenis kegiatan pengembangan koleksi untuk menghindari inkonsistensi pengambilan keputusan pengembangan koleksi. Pada saat menentukan formulasi kebijakan pengembangan koleksi, hendaknya (1) berbagai pihak yang berkaitan langsung dilibatkan untuk mawadahi berbagai usulan/aspirasi

terkait kegiatan pengembangan koleksi, dan (2) penyusunan naskah kebijakan pengembangan koleksi disesuaikan dengan kebutuhan, visi dan misi perpustakaan.

Implementasi kebijakan pengembangan koleksi adalah bentuk konkret formulasi kebijakan, yaitu konsistensi dalam pengambilan keputusan dalam seluruh kegiatan pengembangan koleksi. Keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan koleksi ditentukan berdasarkan (1) konten kebijakan yang akomodatif sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan visi-misi perpustakaan, dan (2) karakteristik dan kondisi perpustakaan.

Evaluasi kebijakan pengembangan koleksi diperlukan untuk mengetahui aspek apa saja yang harus dipertahankan, ditingkatkan dan apa yang perlu diubah sesuai dengan kebutuhan perpustakaan sesuai dengan keadaan yang terkini. Salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan adalah dengan memanfaatkan analisis SWOT. Tujuan utama pemanfaatan analisis SWOT dalam mengevaluasi kebijakan pengembangan koleksi adalah (1) memetakan performa perpustakaan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan koleksi, dan (2) menyusun kembali kebijakan pengembangan koleksi yang akan diimplementasikan di masa mendatang berdasarkan kebutuhan dan keadaan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaputula, Aubrey Harvey & Kanyundo, Allan James. 2014. Collection development policy: how its absence has affected collection development practices at Mzuzu University Library. *Journal of Librarianship and Information Science*, 2014. Vol. 46 (4) 317-325
- Darmono. 2007. *Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Aspek Manajemen dan Tata Kerja*. Jakarta: Grasindo.
- Ernaningsih, Dwi Novita & Dewi, Amalia Nurma. 2016. Urgensi Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Malang, *Pustakaloka*, 2016. Vol. 8(2) 185-200
- Grindle, M. S. 2017. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hasbullah, M. 2016. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Indonesia. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional

- Iswanto, Rahmat. 2017. Kebijakan Pengembangan Koleksi dan Pemanfaatannya di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Analisis Penerapan Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 2017. Vol. 1 (1) 1-17
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Novianto, Achmad Qorni. 2013. Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan MAN 3 Malang. Tugas Akhir, Universitas Negeri Malang. Diakses dari <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/Perpustakaan/article/view/26855>
- Nurkholisha, R. A., & Christiani, L. 2018. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Pada Naskah Nusantara. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(3), 81-90. Tersedia di <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22921>
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Qalyubi, Syihabuddin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutarno NS. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Sagung Seto
- Yulia, Yuyu & Sujana, Janti Gristinawati. 2009. *Pengembangan Koleksi*. Jakarta: Universitas Terbuka.